

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA



KANTOR WILAYAH DJKN PAPUA, PAPUA BARAT DAN MALUKU

LAPORAN KINERJA TAHUN 2020

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG SORONG**

SORONG - 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan anugerahNya sehingga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sorong dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2020.

Laporan Kinerja KPKNL Sorong ini disusun dalam rangka merealisasikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan target yang diberikan kepada KPKNL Sorong dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi .

KPKNL Sorong sebagai pintu masuk dari Pulau Papua merupakan salah satu ujung tombak Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang memberikan layanan kepada pengguna layanan di wilayah Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana.

Hasil pengukuran pencapaian terhadap 12 (dua belas) sasaran strategis (SS) Kemenkeu Three dengan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja utama (IKU), rata-rata tingkat pencapaiannya adalah sebesar **106,55%**. Target IKU yang tercapai/terlampau dengan indikator HIJAU sebanyak 19 (sembilan belas) IKU, dan indikator MERAH sebanyak 2 (dua) IKU.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai KPKNL Sorong atas semangat dan kerjasamanya, Kepala Kantor Wilayah DJKN Papua Maluku beserta staf yang telah memberikan pembinaan dan pengarahan, para rekan-rekan kerja instansi pemerintah pusat dan satuan kerja perangkat daerah

di wilayah kerja KPKNL Sorong yang telah membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Kiranya Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada Kantor Pusat DJKN, Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku serta seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Sorong, sehingga dapat memberikan kritik dan saran untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya.

Sorong, 22 Januari 2021

Kepala Kantor



Indra Eka Putra

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
B. Peran Strategis	6
C. Permasalahan.....	8
D. Upaya Pemecahan Masalah	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis.....	10
B. Penetapan Kinerja.....	13
C. Pengukuran Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	17
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja	18
C. Akuntabilitas Keuangan	34
BAB IV PENUTUP	36

LAMPIRAN :

Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Sorong Tahun 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sorong merupakan salah satu instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang tugas dan fungsi serta struktur organisasinya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. KPKNL Sorong mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan Negara, penilaian, pengurusan piutang Negara dan pelayanan lelang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, KPKNL Sorong menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Registrasi penerimaan berkas ,penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;

8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
9. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
10. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
11. Inventarisasi, pengamanan dan pendayagunaan barang jaminan;
12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
14. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Adapun wilayah kerja KPKNL Sorong adalah meliputi 1 (satu) Kota dan 12 (dua belas) Kabupaten di propinsi Papua Barat dengan perincian sebagai berikut:

1. Kota Sorong,
2. Kabupaten Sorong,
3. Kabupaten Sorong Selatan,
4. Kabupaten Manokwari,
5. Kabupaten Fakfak,
6. Kabupaten Teluk Wondama,
7. Kabupaten Teluk Bintuni,
8. Kabupaten Raja Ampat,
9. Kabupaten Kaimana,
10. Kabupaten Maybrat,
11. Kabupaten Tambrauw,
12. Kabupaten Manokwari Selatan, dan
13. Kabupaten Pengunungan Arfak.

Sumber Daya Manusia (SDM) KPKNL Sorong yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Sorong adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) orang pegawai. Komposisi pegawai KPKNL Sorong dapat dijelaskan pada tabel-tabel sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	I	-	-	-
2	II	9	1	10
3	III	11	3	14
4	IV	1	-	1
Total		18	5	25

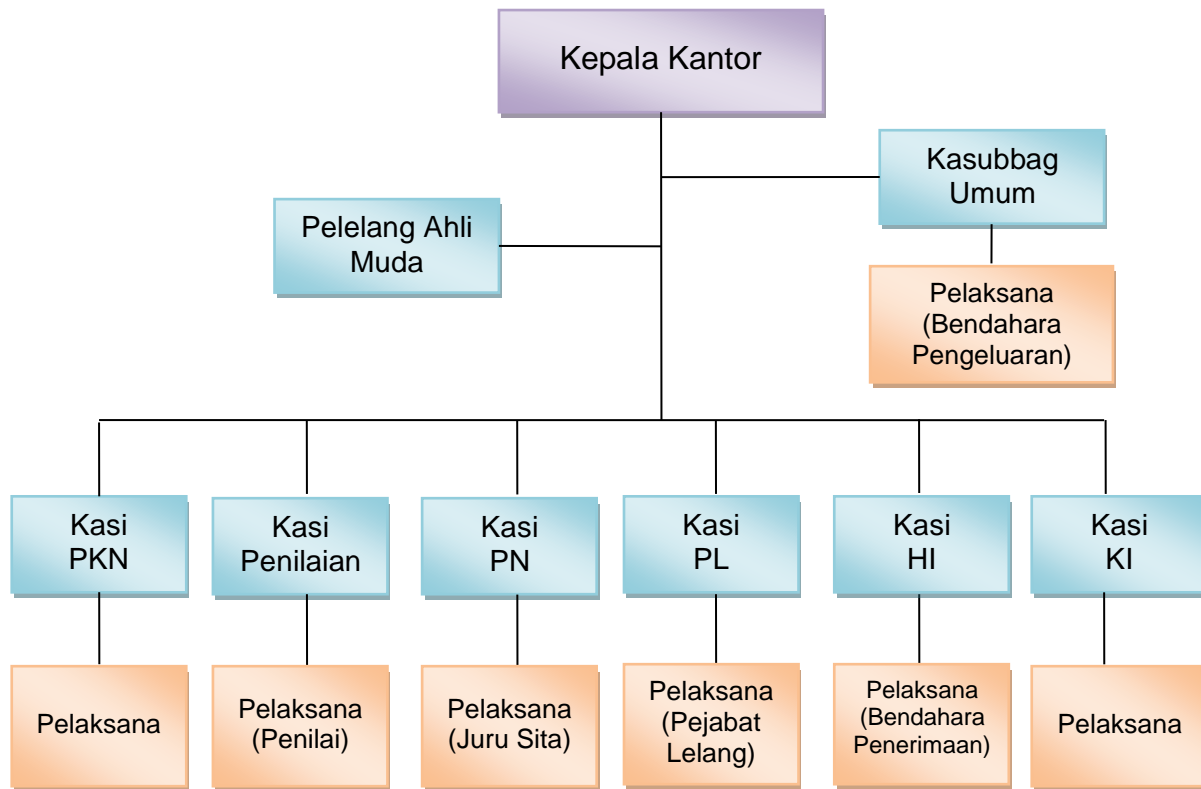
2. Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Golongan				Total
		I	II	III	IV	
1	SD	-	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	-	-	-
3	SLTA/D I/D II	-	4	-	-	4
4	D III	-	6	-	-	6
5	D IV/Sarjana	-	-	12	-	12
6	Pasca Sarjana	-	-	2	1	3
7	Doktor	-	-	-	-	-
Total		-	10	14	1	25

3. Tenaga Fungsional

No	Jabatan Fungsional	Total
1	Juru Sita	2
2	Pejabat Lelang	3
3	Penilai Kekayaan Negara	2
4	Pemeriksa Piutang Negara	1
5	Pengadaan Barang dan Jasa	6
6	Bendahara Penerimaan	3
7	Bendahara Pengeluaran	4
8	PIC TIK	3
9	Sekretaris	1
10	Pelelang	1

Adapun struktur organisasi KPKNL Sorong dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini :



Gambar 1. Struktur Organisasi KPKNL Sorong

Penjelasan struktur organisasi KPKNL Sorong :

1. Kepala Kantor, eselon IIIA;
2. Kepala Sub Bagian Umum (Kasubbag. Umum), eselon IVA, dengan 3 (tiga) orang pelaksana termasuk 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran;
3. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (Kasi PKN), eselon IVA, dengan 3 (tiga) orang pelaksana;
4. Kepala Seksi Pelayanan Penilaian (Kasi Penilaian), eselon IVA, dengan 3 (tiga) orang pelaksana;
5. Kepala Seksi Piutang Negara (Kasi PN), eselon IVA, dengan 2 (dua) orang pelaksana;

6. Kepala Seksi Pelayanan Lelang (Kasi PL), eselon IVA, dengan 1 (satu) orang pelaksana;
7. Kepala Seksi Hukum dan Informasi (Kasi HI), eselon IVA, dengan 3 (tiga) orang pelaksana termasuk 1 (satu) orang Bendahara Penerimaan, dan
8. Kepala Seksi Kepatuhan Internal (Kasi KI), eselon IVA, dengan 3 (tiga) orang pelaksana.
9. Jabatan Fungsional Pelelang 1 (satu) orang.

Dalam kegiatan operasional, KPKNL Sorong telah menempati gedung yang baru dibangun di kompleks Gedung Keuangan Negara (GKN) Sorong, jalan Basuki Rahmat Km.7, Sorong, dengan total luas 750m² yang terdiri dari :

1. Lantai I terdapat ruang Area Pelayanan Terpadu (APT) yang dilengkapi dengan CCTV, ruang tunggu dengan fasilitas TV dan *Free WiFi*, ruang Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, ruang Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Piutang Negara, ruang Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Pelayanan Penilaian, Ruang Pertemuan (Aula), ruang Konsultasi, ruang Laktasi (menyusui), ruang *E-Auction*, ruang Arsip (seksi Pengelolaan Kekayaan Negara dan Seksi Piutang Negara), ruang dapur (*Pantry*) dan kamar mandi/toilet;
2. Lantai II terdapat ruang Kepala KPKNL Sorong, ruang Kepala dan Pelaksana Sub Bagian Umum, ruang Bendahara Pengeluaran, ruang Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Pelayanan Lelang, ruang Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi, ruang Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Kepatuhan Internal, ruang Gudang ATK, ruang Rapat, ruang Server, ruang BKPN, ruang Minut Risalah Lelang dan kamar mandi/toilet.

Prasarana lain yang dimiliki KPKNL Sorong adalah aula/gedung pertemuan yang difungsikan untuk penyimpanan arsip, terletak di Jl. Sudirman No. 8, Sorong yang berdiri di atas tanah seluas 1.784m², (luas gedung 280m² dan halaman gedung 1.504m²).

Disamping itu, KPKNL Sorong memiliki sarana dan prasarana penunjang guna memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi berupa :

- Kendaraan dinas jabatan sebanyak 1 (satu) unit.
- Kendaraan operasional sebanyak 3 (tiga) unit roda empat dan 5 (lima) unit sepeda motor.

- Komputer (PC) sebanyak 29 unit, laptop 15 unit dan printer sebanyak 36 unit, serta server 1 unit (terdiri dari 2 unit komputer, 3 unit UPS), yang juga difungsikan sebagai jaringan intranet dan internet (terhubung dengan jaringan internet Kantor Pusat DJKN).
- Rumah dinas untuk para pejabat sebanyak 7 (tujuh) unit yang berdiri diatas sebagian tanah GKN Sorong (yang dipinjam pakai melalui Kantor Pusat DJKN ke Sekretariat Jenderal Kemenkeu RI) dan 1 (satu) unit berdiri di atas tanah KPKNL Sorong (Jalan Jenderal Sudirman No.8, Sorong). Rumah dinas sebanyak 1 (satu) unit ukuran 70m² untuk kepala kantor dan 7 (tujuh) unit ukuran 50m² untuk kasubbag umum dan para kepala seksi. Dengan terwujudnya pengadaan rumah dinas yang ditempati oleh para pejabat struktural KPKNL Sorong tersebut, akan meringankan terhadap biaya sewa rumah.

B. PERAN STRATEGIS

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL Sorong mempunyai peran strategis sebagai berikut :

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

KPKNL Sorong berperan mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dari kekayaan negara itu sendiri. Peningkatan daya guna dan hasil guna dari kekayaan negara tersebut terutama pada utilisasi kekayaan negara dan pengamanan kekayaan negara. Peran strategis KPKNL Sorong dalam pengelolaan Kekayaan Negara diwujudkan dalam memberikan pelayanan kepada Satuan Kerja (Satker) berupa Inventarisasi dan Penilaian BMN, Utilisasi BMN, Pemindatanganan BMN dan Penetapan status BMN. Selain itu KPKNL Sorong juga memiliki tugas melaksanakan penilaian aset (BMN) yang berperan strategis menyediakan informasi nilai wajar sekaligus analisis penggunaan tertinggi dan terbaik (*the Highest and Best Use* atau *HBU*)

2. Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis KPKNL di bidang pengurusan piutang negara adalah dalam rangka menyelamatkan keuangan negara yang dilakukan dengan mentransformasikan Non Performing Loan menjadi aset yang lebih *liquid* dan berdaya guna untuk mendukung pembangunan. Adapun proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari kementerian atau lembaga.

Langkah Nyata yang dilaksanakan KPKNL Sorong dalam menjalankan Fungsi Pengurusan Piutang Negara dengan memberikan pelayanan Pengurusan Piutang Negara terhadap penyerah piutang yang ada wilayah kerja KPKNL Sorong berupa :

- a. Pelayanan pengurusan piutang negara melalui penagihan langsung ;
- b. Pelaksanaan lelang barang jaminan untuk mempercepat penagihan hutang ;
- c. Melaksanakan penggalian piutang negara macet pada kementerian / lembaga dalam rangka penatausahaan piutang macet, penyerahan piutang macet ke PUPN, dan tata cara pengajuan usul penghapusan piutang negara;
- d. Pemberian sosialisasi / pemahaman pengertian mengenai penatausahaan piutang macet pada kementerian lembaga pada Laporan Keuangan Kementerian Lembaga.

3. Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Sorong secara terus-menerus mengupayakan penggalian potensi lelang baik lelang eksekusi maupun noneksekusi sehingga lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales mean auction*). Pelayanan lelang ditujukan untuk menjadikan lelang sebagai instrumen jual beli yang dikenal secara umum sebagaimana transaksi pasar pada umumnya. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan/penetapan pengadilan.

Lelang mempunyai nilai lebih apabila dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu transparan, akuntabel, kompetitif, efisien dan lebih menjamin kepastian hukum. Risalah lelang merupakan akta otentik yang berfungsi sebagai *akta van transport* untuk peralihan hak.

Sejalan dengan program Kantor Pusat DJKN, KPKNL Sorong telah bekerja sama dengan Bank Mandiri Cabang Sorong untuk pelaksanaan lelang internet dengan penyediaan virtual account (VA). Dengan adanya VA maka proses lelang dapat dilaksanakan secara online/real time sehingga mempermudah masyarakat untuk mengikuti lelang dimanapun berada selama 24 jam.

4. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dalam memberikan pelayanan pengurusan piutang negara, KPKNL Sorong memperoleh hasil berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara (Biad PPN). Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Sorong memperoleh bea lelang termasuk bea lelang yang berasal dari Pegadaian yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada pelayanan pengelolaan kekayaan negara, KPKNL Sorong memperoleh hasil PNBP dari pemanfaatan BMN berupa sewa BMN pada satker Kementerian/Lembaga.

C. PERMASALAHAN

Permasalahan Internal :

1. Sumber daya manusia (SDM) yang kurang memadai dari segi kuantitas dan dari segi keahlian seperti Penilai, Pelelang, dan Pemeriksa Piutang Negara untuk sebuah KPKNL dengan wilayah kerja yang cukup luas (1 kota dan 12 kabupaten) dengan stakeholder yang cukup banyak.

Permasalahan eksternal :

1. Kondisi alam yang berat dan luasnya wilayah kerja KPKNL Sorong yang sebagian besar hanya bisa ditempuh dengan alat transportasi laut dan udara;
2. Kurangnya kualitas SDM dari *stakeholder* yang menjadi mitra kerja KPKNL Sorong tentang pengelolaan BMN.

3. Adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan hampir semua kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
4. Tingkat keamanan yang kurang kondusif di wilayah kerja KPKNL Sorong.

D. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Pemecahan masalah Internal :

1. Telah diajukan permohonan penambahan pegawai ke kantor pusat DJKN serta mengirimkan pegawai KPKNL Sorong untuk mengikuti berbagai diklat dan sosialisasi/workshop. Selain itu untuk meningkatkan kualitas SDM KPKNL Sorong juga sering mengadakan sosialisasi internal (*knowledge sharing*) maupun sosialisasi dengan mengundang narasumber dari luar KPKNL Sorong.

Pemecahan masalah eksternal :

1. Melaksanakan kegiatan rapat, koordinasi, dan pelayanan secara online dengan video conference via aplikasi zoom meeting
2. Mengadakan sosialisasi atau pelatihan, asistensi, dan video tutorial kepada *stakeholder* serta membuka layanan konsultasi yang berkaitan dengan tupoksi KPKNL Sorong.
3. Lebih selektif dalam mengadakan kegiatan/acara atau perjalanan dinas dan berkoordinasi dengan aparat terkait untuk tugas-tugas yang mengandung resiko tinggi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

A.1. Visi

KPKNL Sorong dalam menjalankan fungsi dan tugasnya mempunyai visi dan misi yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari KPKNL yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan. Visi KPKNL Sorong mengikuti visi yang telah ditetapkan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yaitu :

“MENJADI PENGELOLA KEKAYAAN NEGARA, PIUTANG NEGARA DAN PELAYANAN LELANG YANG PROFESIONAL DAN BERTANGGUNG JAWAB UNTUK SEBESAR-BESAR KEMAKMURAN RAKYAT”

Visi dimaksud merupakan kristalisasi dari semangat dan sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran KPKNL Sorong dalam melaksanakan tugas. Dari visi yang ditetapkan tersebut, dapat diuraikan kedalam phrasa sebagai berikut :

- a. **Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang** adalah sebagai lembaga/institusi pemerintah yang berusaha memenuhi kebutuhan para *stakeholder* dalam hal penilaian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan dan penatausahaan kekayaan negara termasuk pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang. Hal ini sesuai dengan konsep dimana pengurusan piutang negara termasuk *asset management* dan lelang termasuk *asset disposal*. Selain itu, lelang sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan transaksi masyarakat.
- b. **Profesional** dalam hal pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang dilakukan sesuai dengan standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan.

- c. **Bertanggung jawab** dalam pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. **Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat**, merupakan cita-cita dan arah dari tujuan akhir pengelolaan kekayaan negara sesuai dengan jiwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

A.2. Misi

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menetapkan misi, yang terdiri dari :

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan penilaian;
4. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
5. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

A.3. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari visi dan misi yang merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka tujuan yang akan dicapai KPKNL adalah :

1. Pengamanan dan pengembalian keuangan Negara, serta memberi kontribusi penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) melalui biaya administrasi pengurusan piutang Negara dan bea lelang;
2. Pelayanan lelang;
3. Pelayanan kekayaan Negara;
4. Pelayanan penilaian kekayaan Negara;
5. Pembinaan sumber daya manusia;

A.4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan atau bulanan. Dalam menentukan sasaran yang akan dicapai diupayakan sasaran dimaksud serealitis mungkin dan dapat dicapai dalam waktu tertentu. Adapun sasaran yang akan dicapai oleh KPKNL Sorong adalah :

1. Mempercepat penyelesaian kasus piutang Negara dan pencapain target;
2. Terciptanya mekanisme pengelolaan barang jaminan yang efektif, efisien dan terpercaya;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan lelang;
4. Meningkatkan pengelolaan data dan minimalisasi perkara hukum;
5. Meningkatkan pemanfaatan kekayaan Negara;
6. Melaksanakan penilaian kekayaan Negara dengan tujuan mewujudkan nilai wajar kekayaan Negara;
7. Meningkatkan dukungan teknis dan administrasi KPKNL Sorong.

A.5. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran. Dalam mencapai sasaran yang ingin dicapai, kebijakan yang dijalankan oleh KPKNL Sorong meliputi :

1. Peningkatan kualitas pelayanan pengurusan piutang Negara
2. Peningkatan pengelolaan barang jaminan
3. Peningkatan kualitas pelayanan lelang
4. Peningkatan kualitas penyajian informasi dan penatausahaan pengurusan piutang Negara dan lelang serta pengoptimalan penanganan perkara
5. Optimalisasi barang milik Negara
6. Penilaian kekayaan Negara
7. Peningkatan pemberian dukungan teknis dan administratif KPKNL Sorong

A.6. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kebijakan yang dijalankan oleh KPKNL Sorong diuraikan dalam program sebagai berikut :

1. Percepatan pelayanan pengurusan piutang Negara;
2. Pengaman barang jaminan;
3. Percepatan pelayanan lelang;
4. Mengoptimalkan sistem administrasi data PPLN;
5. Mengoptimalkan upaya penyelesaian perkara;
6. Pelayanan di bidang kepegawaian;
7. Pelayanan di bidang keuangan;
8. Pelayanan di bidang umum;
9. Tertib administrasi barang milik Negara;
10. Pemanfaatan barang milik Negara;
11. Penilaian barang milik Negara.

B. Penetapan Kinerja

Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Sementara itu dokumen Penetapan Kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Sorong harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan Sasaran Strategis KPKNL Sorong. Sasaran Strategis KPKNL Sorong Tahun 2015 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Sorong tersebut di atas.

Sasaran Strategis (SS) KPKNL Sorong selanjutnya dikembangkan ke dalam 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama KPKNL Sorong sebagaimana disajikan dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, Target Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	1a-CP Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%
		1b-CP Tingkat penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2016)	3%
		1c-N Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	100%
2.	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	2a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,30
3.	Pengelolaan lelang yang optimal	3a-CP Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)	100%
4.	Manajemen pelayanan yang berkualitas	4a-CP indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang	86
5.	Tata kelola kekayaan negara yang efektif	5a-CP Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%
		5b-CP Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	100%
		5c-CP Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi	100%
		5d-CP Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%
6.	Penilaian yang berkualitas	6a-CP Deviasi ketergunaan hasil penilaian	30%
7.	Tata kelola lelang yang efektif	7a-CP Persentase produktivitas lelang	34%
		7b-CP Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan econventional auction	90%
8.	Edukasi yang efektif	8a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	86

9.	Pengawasan dan pengendalian yang efektif	9a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	80%
		9a-CP Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN	100%
10.	SDM yang kompeten	10a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
11.	Organisasi yang fit for purpose	11a-N Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM	75
		11b-N Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC	70
		11c-N indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai	80
12.	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	12a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%

C. Pengukuran Kinerja

Dalam pengukuran capaian indikator kinerja KPKNL Sorong Tahun 2020, KPKNL Sorong berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximize* semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a). Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b) Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dikonversi menjadi 120%.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari tiga (3) jenis, yaitu:

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Maximize*

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan

2. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Minimize*

$$\text{Indeks Capaian} = [1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target})] \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.

3. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Stabilize*

$$I = I_n + \frac{I_{n+1} - I}{C_{n+1} - C_n} (C - C_n)$$

IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian IKU KPKNL Sorong tahun 2020 adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja IKU Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	1a-CP Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	71,53%	71,53%
		1b-CP Tingkat penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2016)	3%	0,42%	14,03%
		1c-N Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	100%	105,63%	105,63%
2.	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	2a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,30	4,59	105,63%
3.	Pengelolaan lelang yang optimal	3a-CP Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)	100%	135,81%	120,00%
4.	Manajemen pelayanan yang berkualitas	4a-CP indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang	86	99,92	116,18%
5.	Tata kelola kekayaan negara yang efektif	5a-CP Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	340,00%	120,00%
		5b-CP Persentase efektivitas penyelesaian BKN	100%	118,18%	118,18%
		5c-CP Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi	100%	110,47%	110,47%
		5d-CP Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	110,53%	110,53%
6.	Penilaian yang berkualitas	6a-CP Deviasi ketergunaan hasil penilaian	30%	0,14%	120,00%
7.	Tata kelola lelang yang efektif	7a-CP Persentase produktivitas lelang	34%	54,00%	120,00%
		7b-CP Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan econventional auction	90%	100,00%	111,11%
8.	Edukasi yang efektif	8a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	86	88,63	103,06%
9.	Pengawasan dan pengendalian yang efektif	9a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	80%	100,00%	120,00%
		9a-CP Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN	100%	104,77%	104,77%
10.	SDM yang kompeten	10a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120,00%	120,00%
11.	Organisasi yang fit for purpose	11a-N Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM	75	95,07	120,00%
		11b-N Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC	70	79,00	112,86%
		11c-N indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai	80	94,98	118,72%

12.	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	12a-CP anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan	95%	97,96%	103,12%
-----	---	-----------------	---------------------------------	-----	--------	---------

Berdasarkan data diatas, dapat disampaikan hasil evaluasi Kinerja tahun 2020 terhadap 21 (dua puluh satu) IKU dalam Kemenkeu-*Three* KPKNL Sorong, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Sebanyak 19 (sembilan belas) IKU status pencapaian HIJAU;.
- Sebanyak 2 (dua) IKU status pencapaian MERAH.

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

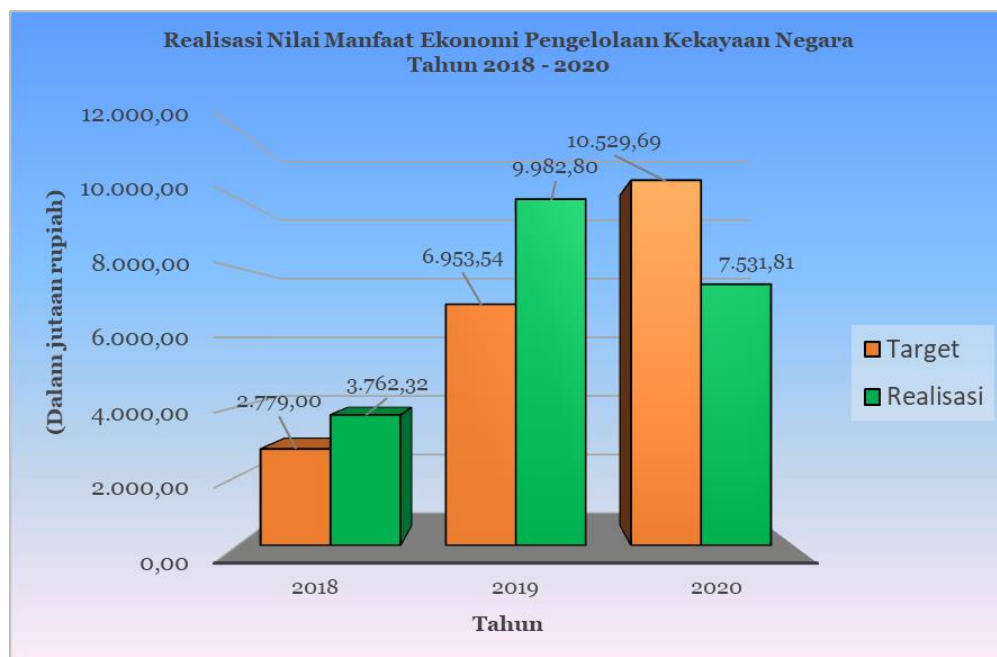
Untuk mengetahui keberhasilan KPKNL Sorong tahun 2020 adalah dengan melakukan evaluasi dan analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan lindikator Kinerja Utama Kemenkeu *Three* sebagai berikut :

1. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (WKN.17-1)

a. IKU Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang (WKN.17/KNL.03-1a-CP)

Pencapaian Nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara pada tahun 2020 sebesar **Rp7.531.813.932,-** dari target **Rp10.529.691.029,-** dengan indeks capaian sebesar **71,32%**. Capaian tersebut berasal dari PNBPN Pengelolaan BMN sebesar **Rp3.584.639.490,-**, PNBPN PN **Rp10.004.308,-** dan PNBPN Lelang **Rp3.937.170.134,-**.

Grafik 1.1



Berdasarkan realisasi tahun 2019 sebesar **Rp9.982.800.884,-** maka realisasi tahun 2020 mengalami Penurunan sebesar **Rp2.473.154.952,-** atau sebesar **24,77%**.

Berdasarkan realisasi tahun 2018 sebesar **Rp3.762.325.542,-** maka realisasi tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar **Rp3.747.320.390,-** atau sebesar **99,60%**.

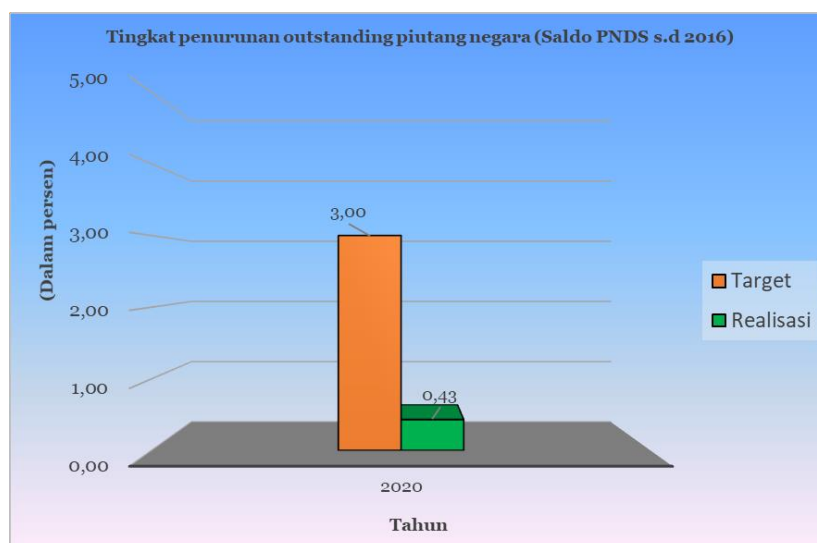
Target tersebut tidak tercapai karena :

- Proses permohonan pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa tahun 2020 dengan nilai sewa yang kecil terkendala;
- Mayoritas BKPN tidak diketemukan Penanggung Hutang/Penjamin Hutang (PH/PjH), Mayoritas alamat PH/PjH di luar Kota Sorong, keterbatasan anggaran dan SDM khususnya Pemeriksa Piutang Negara;
- Adanya kebijakan pada masa pandemi Covid-19 yang membatasi kegiatan perjalanan dinas keluar kota sehingga proses penilaian dalam rangka sewa BMN ditunda;

b. IKU Tingkat penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2016) (WKN.17/KNL.03-1b-CP)

Pencapaian Tingkat penurunan outstanding piutang negara pada tahun 2020 sebesar **Rp217.205.136,-** dari target total outstanding sejumlah **Rp51.593.773.401,-** dengan indeks capaian sebesar **0,42%** dari target **3%**. BKPN yang termasuk dalam target IKU ini adalah BKPN yang SP3N-nya dibuat sebelum tgl 31 Desember 2016. IKU ini merupakan IKU baru.

Grafik 1.2



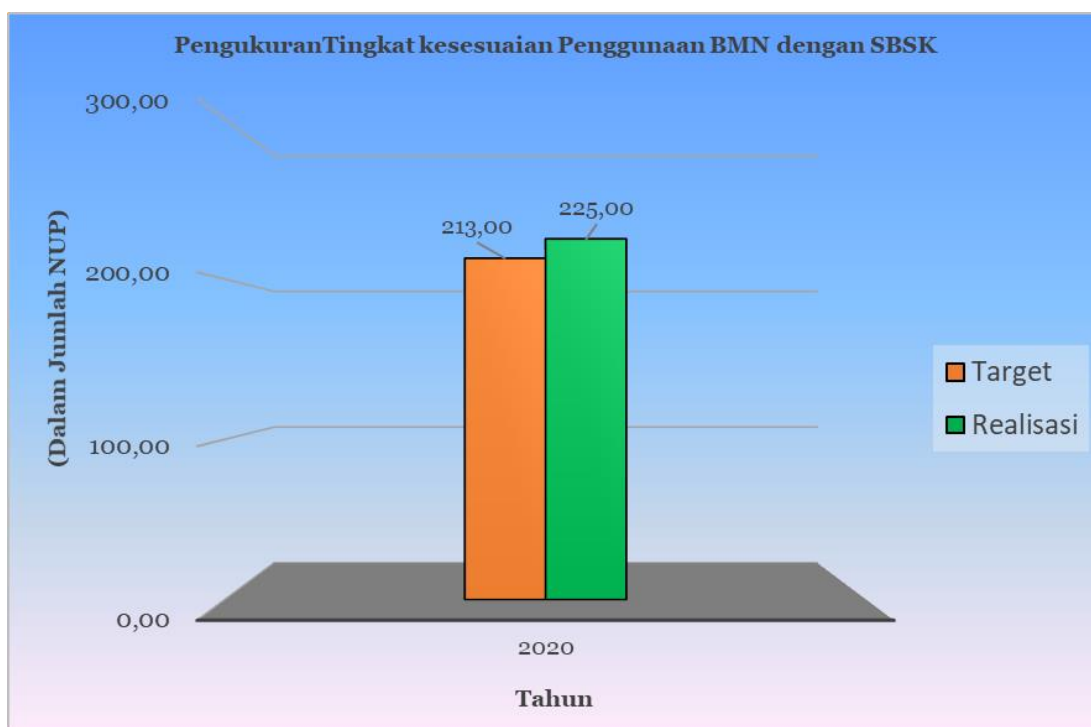
Target tersebut tidak tercapai karena :

- Jumlah BKPN Aktif pada KPKNL Sorong (< 31 Desember 2016) sejumlah 8 BKPN, dimana 2 BKPN besar yang menyumbang saldo outstanding sebesar 99% yang mayoritas BKPN tidak diketemukan PH/PjH sehingga sulit tertagih;
- Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang tidak jelas, tidak diketemukan, sudah meninggal, perusahaan sudah bubar/tidak beroperasi;
- Keterbatasan SDM (tidak ada Pemeriksa) dan Anggaran karena lokasi Penanggung Hutang di luar Kota/Kabupaten Sorong.

c. IKU Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK (WKN.17/KNL.03-1c-N)

Pencapaian Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK pada tahun 2020 sebesar **225 NUP** barang dari target **213 NUP** barang dengan indeks capaian sebesar **105,63%**.

Grafik 1.3



Target tersebut dapat tercapai karena :

- Adanya koordinasi yang baik antara KPKNL dengan satuan kerja dalam hal ini Kementerian Keuangan yang menjadi target pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK.

2. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien (WKN.17-2)

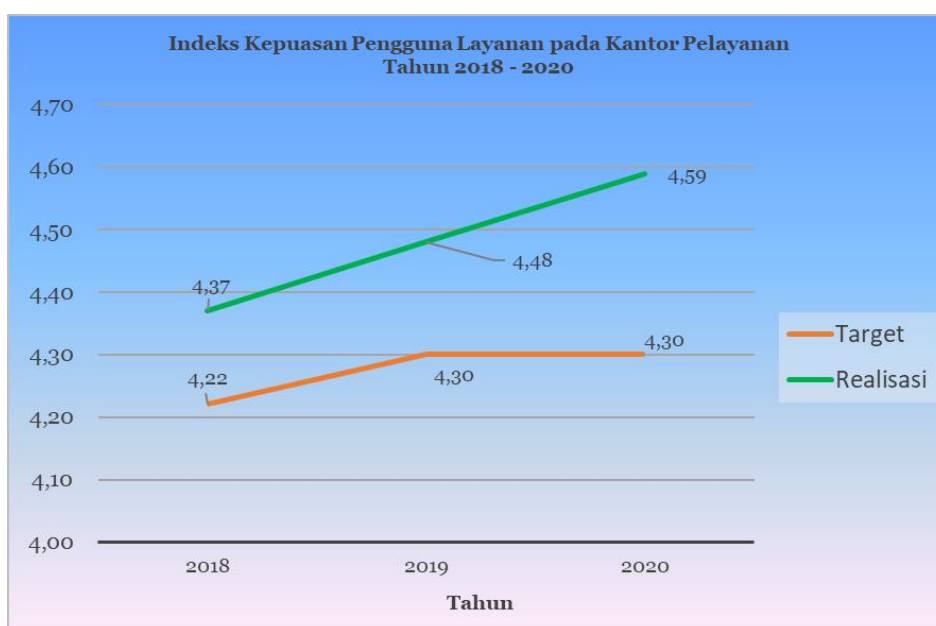
a. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada Kantor Pelayanan (WKN.17/KNL.03-2a-CP)

Merupakan nilai kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan dalam hal ini pengguna layanan produk-produk KPKNL. Pelaksanaan survei pengguna layanan ini lebih difokuskan pada penilaian *stakeholder* atas penyelesaian layanan unggulan (*quick win*) dengan memberikan kuesioner kepada pengguna layanan.

Dari survei yang telah dilakukan oleh pihak internal KPKNL Sorong pada tahun 2020 diperoleh indeks sebesar **4,59** lebih tinggi dari target sebesar **4,3** atau pencapaian sebesar **106,74%**.

Hasil ini diperoleh berdasarkan hasil survei internal yang telah dilakukan dan penyebaran kuesioner terhadap *stakeholder*, dimana hasilnya menunjukkan tren positif dengan meningkatnya tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap pelayanan yang dilakukan KPKNL Sorong.

Grafik 2.1



Berdasarkan realisasi tahun 2019 dengan indeks **4,48** maka realisasi tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar **0,11 poin** atau sebesar **2,45%**.

Berdasarkan realisasi tahun 2018 dengan indeks **4,37** maka realisasi tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar **0,22 poin** atau sebesar **5,03%**.

3. Pengelolaan lelang yang optimal (WKN.17-3)

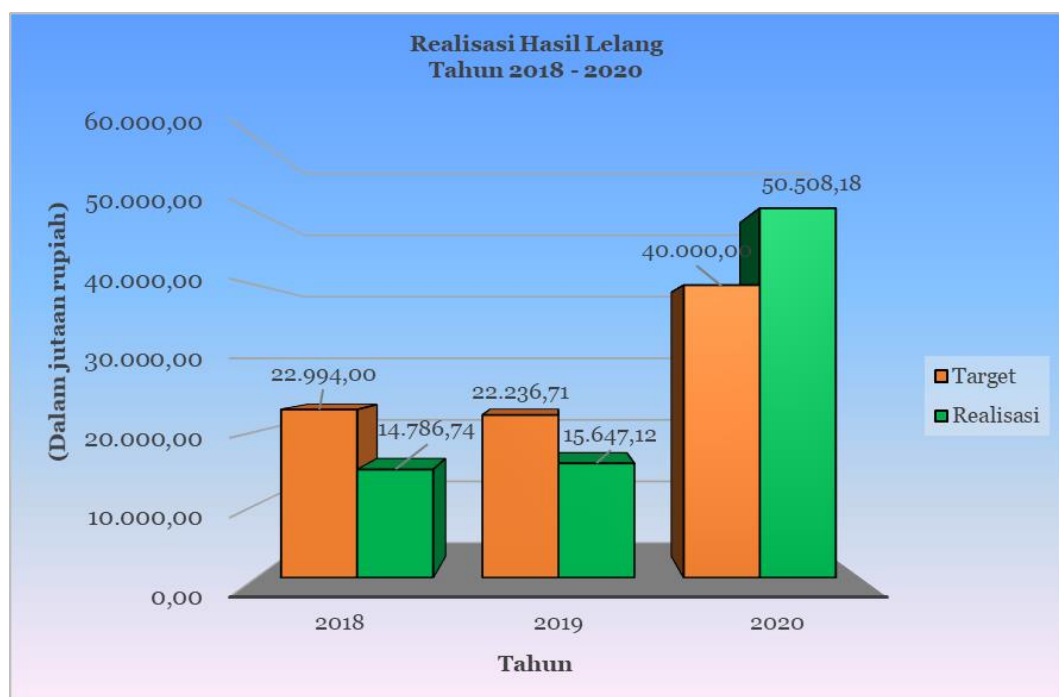
a. Persentase hasil lelang (Pokok Lelang) (WKN.17/KNL.03-3a-CP)

Jumlah pokok lelang yang dapat diselesaikan dalam satuan rupiah pada tahun 2020 sebesar **Rp121.145.023.025,-** dari target **Rp89.200.000.000,-** atau pencapaian sebesar **135,81%**. Realisasi tersebut diperoleh dari realisasi pokok lelang PL Kelas I sebesar **Rp50.058.189.225,-** dan realisasi pokok lelang pegadaian **Rp71.086.833.800,-**.

Berdasarkan realisasi tahun 2019 sebesar **Rp15.647.126.650,-** maka realisasi tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar **Rp34.411.062.575,-** atau sebesar **219,91%**. Berdasarkan realisasi tahun 2018 sebesar **Rp14.786.747.096,-** maka realisasi tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar **Rp35.271.442.129,-** atau sebesar **238,53%**.

Target hasil lelang tahun 2019 dan 2018 adalah pokok lelang PL Kelas I, tidak termasuk pokok lelang dari pegadaian.

Grafik 3.1



Tercapainya IKU persentase hasil lelang disebabkan beberapa hal berikut :

- Melaksanakan lelang sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku
- Berkoordinasi dengan seluruh Stakeholder potensial sehingga mencapai realisasi pokok lelang secara optimal.
- Adanya lelang dari curator dengan jumlah besar sehingga target bisa tercapai

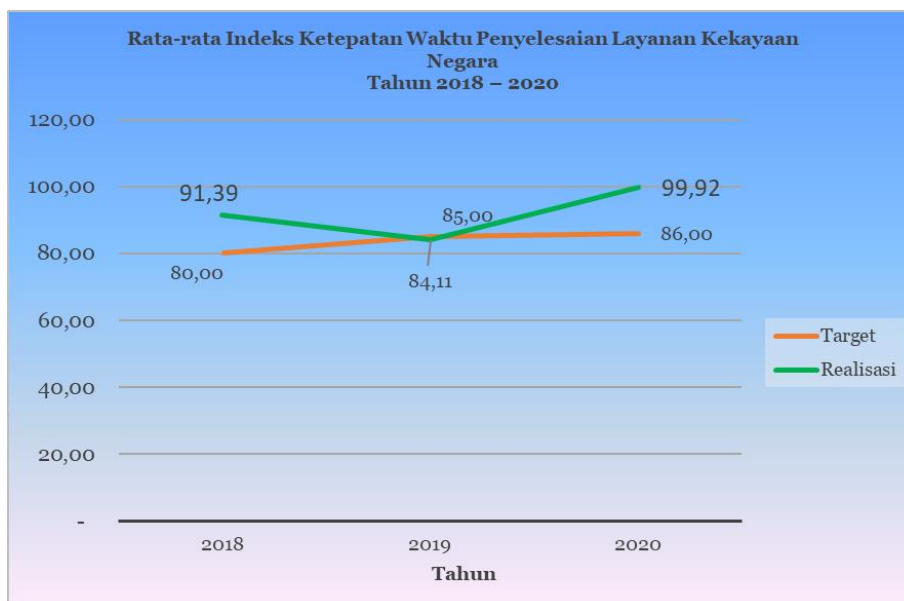
4. Manajemen Pelayanan yang Berkualitas (WKN.17-4)

a. Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang (WKN.17/KNL.03-4a-CP)

Pada KPKNL terdapat 13 (tiga belas) SOP layanan unggulan KPKNL yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 187/KMK.01/2010. Pengukuran difokuskan pada kesesuaian prosedur dan batas waktu penyelesaian yang sesuai dengan janji layanan dalam SOP layanan unggulan. Penyelesaian permohonan dihitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

Tahun 2020 rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara yang dilakukan oleh KPKNL Sorong adalah sebesar **99,92** dari target **86**, sehingga indeks capaian IKU ini pada tahun 2019 sebesar **116,18%**.

Grafik 4.1



Berdasarkan realisasi tahun 2019 dengan indeks **84,11** maka realisasi tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar **15,81 poin** atau sebesar **18,79%**.

Berdasarkan realisasi tahun 2018 dengan indeks **91,39** maka realisasi tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar **8,53 poin** atau sebesar **9.33%**.

Tercapainya rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara ini dikarenakan pada tahun 2020 walaupun KPKNL Sorong masih melaksanakan kegiatan revaluasi BMN dan adanya pandemi Covid-19 tapi KPKNL tetap menjalankan SOP sesuai dengan waktu yang ditetapkan sehingga target bisa tercapai.

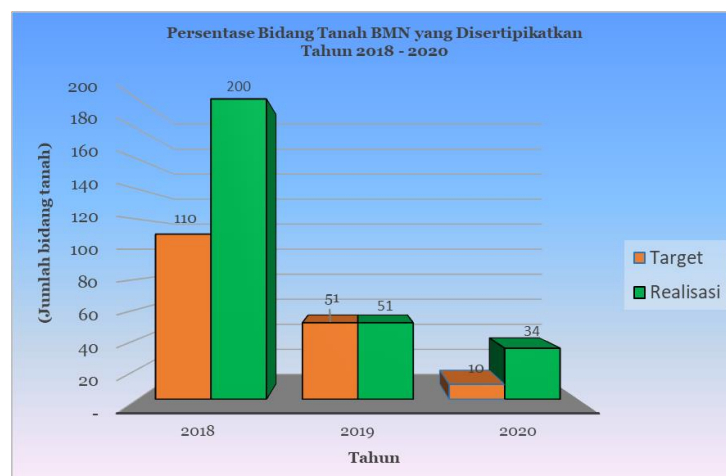
5. Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif (WKN.17-5)

a. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan (WKN.17/KNL03-5a-CP).

Capaian IKU Presentase verifikasi hasil identifikasi dan pendataan BMN berupa tanah pada tahun 2020 sebanyak **34 bidang tanah** dari target sebanyak **10 bidang tanah** dengan indeks capaian sebesar **340%**.

Berdasarkan realisasi tahun 2019, jumlah bidang tanah yang dapat disertipikat sebanyak **51 bidang tanah** maka realisasi tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak **16 bidang tanah** atau sebesar **31,37%** dari tahun 2018. Berdasarkan realisasi tahun 2018, jumlah bidang tanah yang dapat disertipikat sebanyak **200 bidang tanah** maka realisasi tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak **166 bidang tanah** atau sebesar **83%** dari tahun 2018. Walaupun demikian realisasi tahun 2020 telah berhasil dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Grafik 5.1



Target dapat tercapai karena :

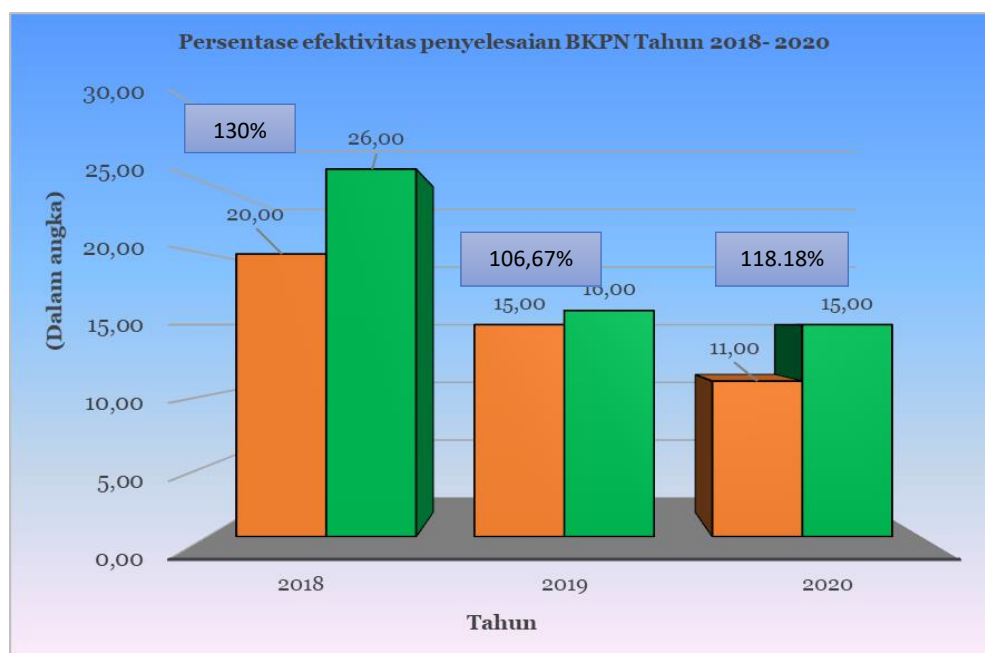
- Pemahaman yang baik oleh satker tentang pentingnya pengelolaan BMN secara tertib khususnya terhadap BMN berupa tanah;
- Terjalannya koordinasi dan komunikasi yang baik antara KPKNL Sorong dengan Satker-satker dan Kantor Pertanahan dalam hal pensertifikatan BMN berupa tanah secara tertib;
- Adanya aplikasi SIMANTAP yang merupakan aplikasi untuk membantu mempermudah proses sertifikasi dan pengumpulan data.

b. Persentase efektivitas penyelesaian BKPN (WKN.17/KNL03-5b-CP).

Pencapaian IKU Persentase efektivitas penyelesaian BKPN Kategori I (s.d. 31 Des 2010) sebanyak 0, Kategori II (1 Jan 2011 s.d. 31 Des 2019) sebanyak 11, Kategori III (Tahun 2020) sebanyak 4 dengan Total Jumlah **15 BKPN** selama 2020 dari target **11 BKPN** dengan persentase sebesar **118,318%**.

Berdasarkan realisasi tahun 2019, jumlah BKPN yang diselesaikan sebanyak **16 BKPN** maka realisasi tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak **1 BKPN** atau sebesar **6.25%** dari tahun 2019. Berdasarkan realisasi tahun 2018, jumlah BKPN yang dapat diselesaikan sebanyak **26 BKPN** maka realisasi tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak **11 BKPN** atau sebesar **42,3%** dari tahun 2020. Walaupun demikian realisasi tahun 2020 telah berhasil dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Grafik 5.2



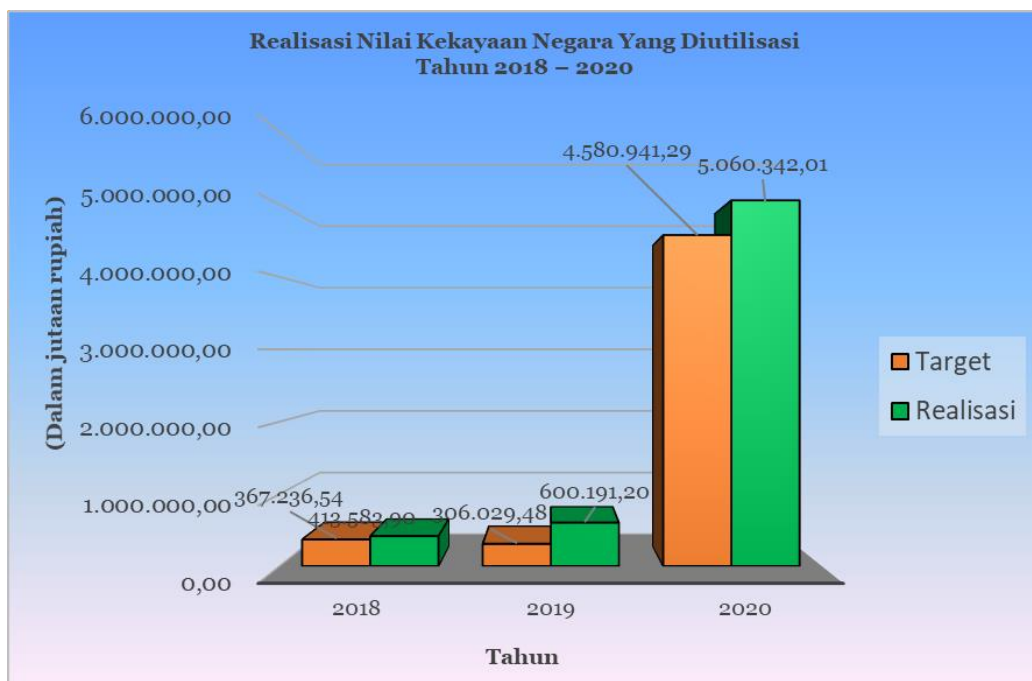
Tercapainya pengurusan piutang negara yang optimal pada tahun 2020 disebabkan oleh :

- Melakukan pemetaan BKPN serta meningkatkan tahapan pengurusan Piutang Negara secara optimal;
- Semakin baiknya hubungan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di bidang pengurusan piutang negara (penyerah piutang).

c. Persentase Nilai kekayaan negara yang diutilisasi (WKN.17/KNL.03-5c-CP).

Pencapaian Nilai kekayaan negara yang diutilisasi pada tahun 2020 sebesar **Rp5.060.342.014.918,-** dengan indeks capaian sebesar **110,47%**, yang berasal dari Penetapan Status Penggunaan BMN.

Grafik 5.3



Berdasarkan realisasi tahun 2019 sebesar **Rp600.191.282.008,-** maka realisasi tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar **Rp4.460.150.732.910,-** atau sebesar **743,12%**.

Berdasarkan realisasi tahun 2018 sebesar **Rp413.583.937.257,-** maka realisasi tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar **Rp4.646.758.077.661,-** atau sebesar **1123,53%**.

Target tersebut dapat tercapai karena :

- Pemahaman yang baik oleh satker tentang optimalisasi pengelolaan kekayaan Negara yang diperoleh dari kegiatan sosialisasi yang

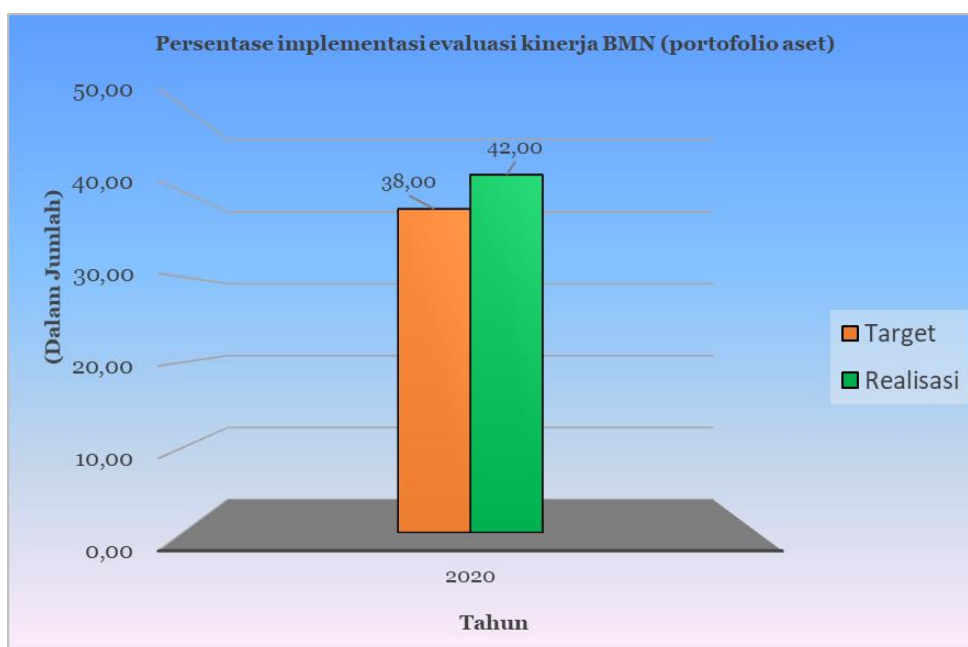
dilakukan oleh KPKNL Sorong mengenai optimalisasi pengelolaan kekayaan Negara;

- Kesadaran dalam pentingnya proses penetapan status BMN dalam rangka pengelolaan BMN;
- Kegiatan penggalan potensi utilisasi BMN yang dilakukan kepada satker-satker potensial.

d. Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) (WKN.17/KNL.03-5d-CP).

Pencapaian persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) pada tahun 2020 sebesar **42 NUP** dari target **38 NUP** dengan indeks capaian sebesar **110.53%**, IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2020.

Grafik 5.4



Target tersebut dapat tercapai karena :

- Adanya koordinasi yang baik antara KPKNL dengan satuan kerja yang menjadi target implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset).

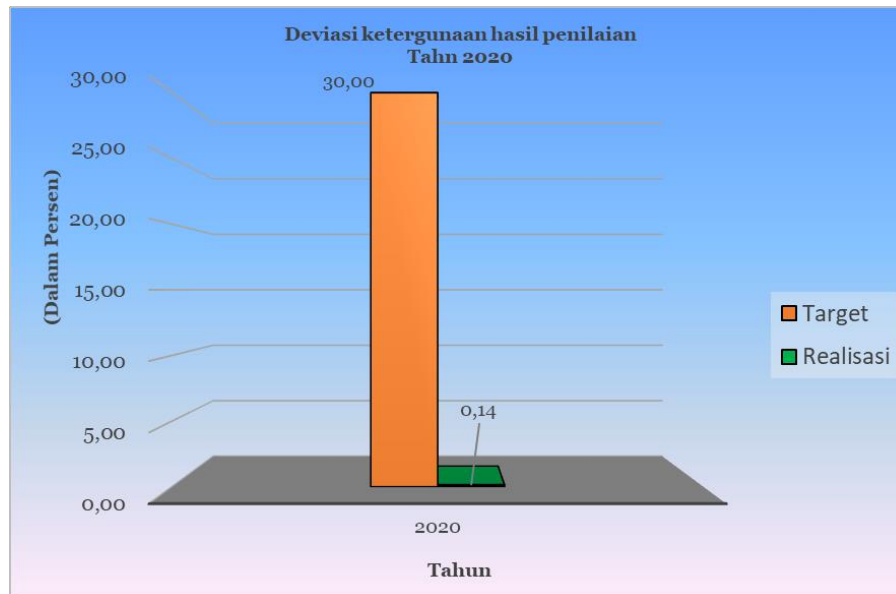
6. Penilaian yang berkualitas (WKN.17-6)

a. Deviasi ketergunaan hasil penilaian (WKN.17/KNL.03-6a-CP)

Pencapaian persentase Deviasi ketergunaan hasil penilaian pada tahun 2020 sebesar **0.14%** dari target **30%** dengan indeks capaian sebesar **199.52%**, Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang

ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama dengan metode Polarisasi IKU minimize sehingga semakin kecil nilainya maka realisasinya akan tercapai, IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2020.

Grafik 6.1.



Target tersebut dapat tercapai karena :

- Selisih nilai yang dihasilkan oleh Penilai sesuai laporan penilaian dengan persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang;
- Terus berkoordinasi dengan Satker selaku Pemohon Penilaian serta Seksi PKN selaku Pengelola Barang;
- Melakukan edukasi kepada satker dalam rangka penentuan nilai taksiran.

7. Tata kelola lelang yang efektif (WKN.17-7)

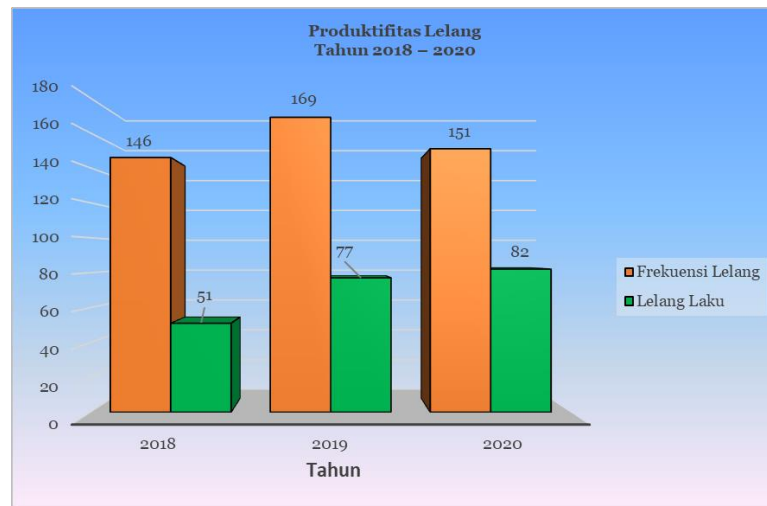
a. Persentase produktifitas lelang (WKN.17/KNL.03-7a-CP)

Persentase produktifitas lelang adalah persentase jumlah lelang yang laku terhadap jumlah frekuensi lelang. Pada tahun 2020, jumlah lelang yang laku adalah sebanyak **82 (delapan puluh dua)** frekuensi lelang dari total **151 (seratus lima puluh satu)** frekuensi atau sebesar **54%** dari target **34%** dengan indeks capaian sebesar **158,82%**.

Berdasarkan realisasi tahun 2019, jumlah lelang yang laku adalah sebanyak **77 (tujuh puluh tujuh)** frekuensi lelang dari target sebanyak **169 (seratus**

enam puluh sembilan) frekuensi lelang atau sebesar **45,56%** maka realisasi tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar **8,44%**. Berdasarkan realisasi tahun 2018, jumlah lelang yang laku adalah sebanyak **51 (lima puluh satu)** frekuensi lelang dari target sebanyak **146 (seratus empat puluh enam)** frekuensi lelang atau sebesar **31,68%** maka realisasi tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar **22,32%**.

Grafik 7.1



Dan Jumlah Frekuensi Lelang Sukarela atau perorangan dengan nilai dibawah atau sama dengan Rp500.000 pada tahun 2020 dengan realisasi sebanyak **1 (satu) frekuensi** lelang dengan target **1 (satu) frekuensi** lelang.

b. Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction (WKN.17/KNL.03-7b-CP)

E-auction merupakan aplikasi berbasis internet yang dapat diakses melalui browser dan juga smartphone, dengan adanya aplikasi *e-auction*, peserta lelang dapat mengikuti lelang dari dan dimanapun berada, sangat praktis dan membantu tentunya. Sebagai salah satu layanan *quick wins* di dalam transformasi kelembagaan, tujuan dari pembangunan aplikasi ini adalah sebagai sarana untuk mencapai tekad DJKN untuk menjawab modernisasi pelayanan lelang dan juga merupakan kelanjutan program reformasi birokrasi Kementerian Keuangan.

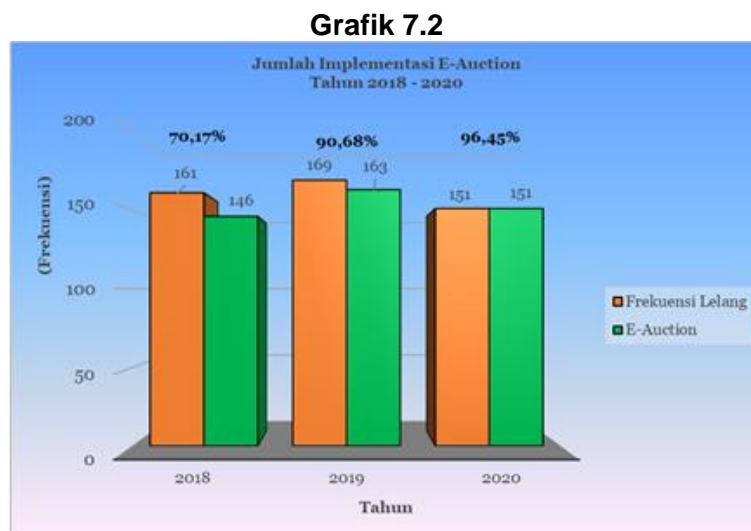
Persentase implementasi *e-auction* pada tahun 2020 adalah sebanyak **151** frekuensi lelang dari total **151** frekuensi lelang atau sebesar **100%** dari target **90%**, sehingga indeks capainnya adalah sebesar **111,11%**.

Berdasarkan realisasi tahun 2019 sebesar **107,17%** (realisasi **163** frekuensi *e-auction* dari target **169** frekuensi *e-auction*), maka realisasi

tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar **3.94%**. Dari sisi frekuensi pun walaupun mengalami penurunan yakni dari **163** frekuensi menjadi **151** frekuensi *e-auction* namun realisasi 2020 tetap mencapai target.

Berdasarkan realisasi tahun 2018 sebesar **90,68%** (realisasi **146** frekuensi *e-auction* dari target **161** frekuensi *e-auction*), maka realisasi tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar **20,43%**. Dari sisi frekuensi pun mengalami peningkatan yakni dari **146** frekuensi menjadi **151** frekuensi *e-auction*.

Implementasi *e-auction* ini akhirnya telah mencapai 100% dari total frekuensi lelang, dengan kata lain seluruh pelaksanaan lelang telah menggunakan *e-auction*.



8. Edukasi yang efektif (WKN.17-8)

a. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi (WKN.17/KNL.03-8a-N)

Efektivitas edukasi dan komunikasi merupakan bentuk pengukuran tingkat keberhasilan peserta (stakeholders) dalam hal pemahaman substansi/materi yang disampaikan melalui pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. Dari kegiatan sosialisasi tentang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, penilaian kekayaan negara, dan pelayanan lelang yang telah dilaksanakan oleh KPKNL pada tahun 2019, telah dilakukan pengukuran tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi melalui kuesioner dengan indeks keberhasilan sebesar **88,63 (delapan puluh delapan koma enam puluh tiga)** dari target **86 (delapan puluh enam)** dengan indeks capaian **103,06%**, artinya edukasi dan komunikasi yang dilakukan oleh KPKNL Sorong kepada stakeholders adalah Efektif.

Berdasarkan realisasi tahun 2019 sebesar 90,00 maka realisasi tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,37 atau sebesar 1,52%.

Berdasarkan realisasi tahun 2018 sebesar 85,30 maka realisasi tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 3,33 atau sebesar 3,90%.

Grafik 8.1



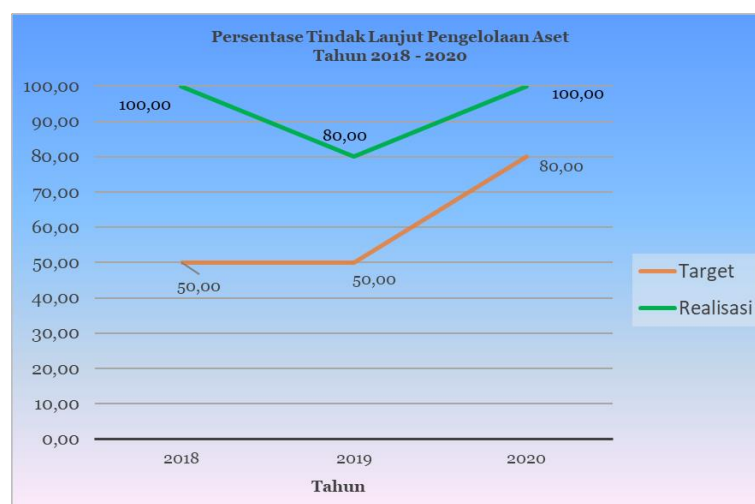
9. Pengawasan dan pengendalian yang efektif (WKN.17-9)

a. Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset (WKN.17/KNL.03-9a-CP).

Capaian untuk persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset pada tahun 2020 adalah **100%** dari target **80%** dengan indeks capaian **125%**.

Berdasarkan realisasi tahun 2019 sebesar **80%** maka realisasi tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar **20%**. Berdasarkan realisasi tahun 2018 sebesar **100%** maka realisasi tahun 2020 tidak mengalami kenaikan/penurunan.

Grafik 9.1



b. Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN (WKN.17/KNL.03-9b-CP).

Capaian Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN pada tahun 2020 sebesar **104,77%** dari target **100%**. IKU ini merupakan kinerja revaluasi BMN yang dilaksanakan pada tahun 2020. Dengan perhitungan capaian S7 sebanyak **1322 NUP x 80%**, capaian S8 sebanyak **265 NUP x 90%**, dan capaian S9 sebanyak **5334 NUP x 100%** dengan keseluruhan capaian **6921 NUP**.

10. SDM yang kompeten (WKN.17-10)

a. Persentase pengembangan kompetensi pegawai (WKN.17/KNL.03-10a-N).

Persentase pengembangan kompetensi pegawai (WKN.17/KNL.03-10a-N) Persentase pengembangan kompetensi pegawai yang dapat dicapai tahun 2020 adalah sebesar **120%** dari target sebesar **100%** dengan indeks capaian **120,00%**. Seluruh pegawai KPKNL Sorong telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan Tugas/Fungsi Jabatannya masing-masing.

11. Organisasi yang fit for purpose (WKN.17-11)

a. Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM (WKN.17/KNL.03-11a-N).

Pencapaian Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM pada tahun 2020 sebesar **95,07** dari target **75** dengan indeks capaian sebesar **126,76%** dan IKU ini merupakan IKU baru karena KPKNL Sorong terpilih untuk mengikuti kegiatan WBK/WBBM di tahun 2020 dan mendapatkan predikat WBK.

b. Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC (WKN.17/KNL.03-11b-N).

Pencapaian Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC pada tahun 2020 sebesar **79** dari target **70** dengan indeks capaian sebesar **112,86%**. Berdasarkan realisasi tahun 2019 sebesar 80 maka realisasi tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 1 poin. Walaupun demikian realisasi tahun 2020 telah melampaui dari target yang ditetapkan.

c. Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai (WKN.17/KNL.03-11c-N).

Pencapaian Indeks efektivitas penyelenggaraan pada tahun 2020 sebesar 94,98% dari target 80% dengan indeks capaian sebesar 118,72% dan IKU ini merupakan IKU baru.

12. Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal (WKN.17-12)

a. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran (WKN.17/KNL.03-12a-CP).

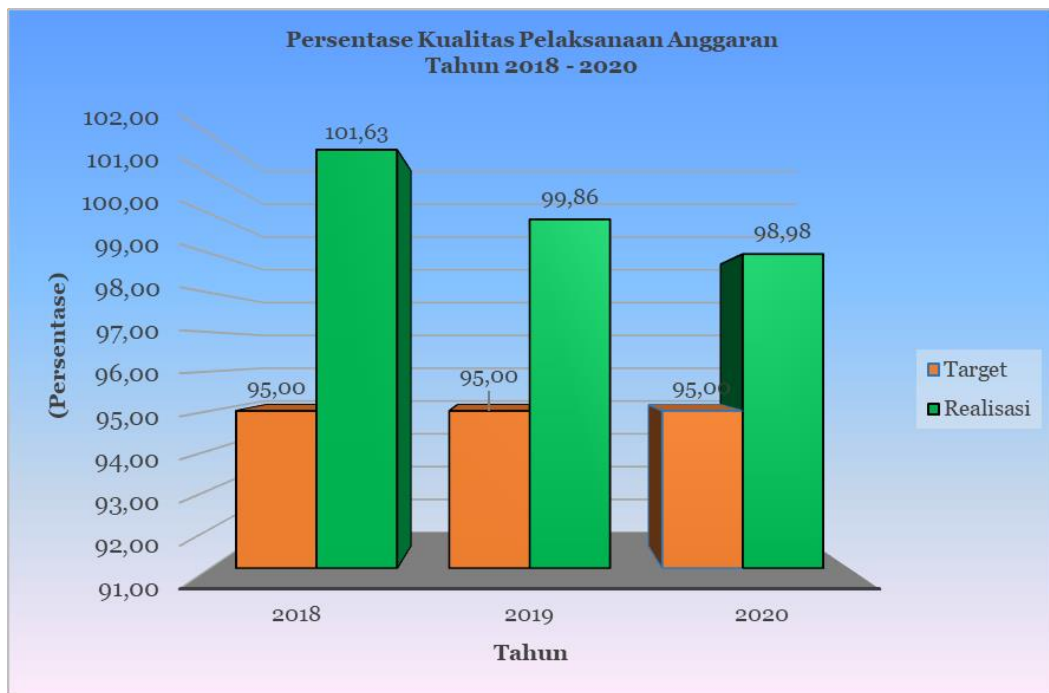
DIPA adalah Daftar Isian Pagu Anggaran yang merupakan daftar pelaksanaan kegiatan bagi satker yang disertai dengan alokasi dananya. Realisasi DIPA adalah jumlah dana yang dibelanjakan oleh satker di lingkungan DJKN. Alokasi DIPA adalah jumlah dana yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk satker lingkungan DJKN. Penyerapan DIPA merupakan perbandingan antara realisasi DIPA dengan alokasi DIPA. Jenis belanja yang dijadikan sebagai realisasi IKU adalah jenis belanja modal dan belanja barang. IKU ini mengukur kesesuaian realisasi belanja Belanja Barang dan Belanja Modal yang dilaksanakan dibandingkan pagu Belanja Barang dan Belanja Modal yang telah ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan (BA 015). Belanja pegawai tidak diukur karena penyerapannya relatif mudah tercapai. Pada tahun anggaran 2019 persentase kualitas pelaksanaan anggaran DIPA KPKNL Sorong sebesar **98,98%** dari target sebesar **95%**, jadi indeks capaian kualitas pelaksanaan anggaran KPKNL Sorong tahun 2019 adalah sebesar **104,19%**.

Berdasarkan realisasi tahun 2019 sebesar **99,86%**, maka realisasi tahun 2020 mengalami penurunan sebesar **0,88%**.

Berdasarkan realisasi tahun 2018 sebesar **101,63%**, maka realisasi tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar **2,56%**.

Walaupun demikian realisasi tahun 2020 telah melampaui dari target yang ditetapkan.

Grafik 12.1



C. Akuntabilitas Keuangan

1. Realisasi Anggaran

Untuk membiayai satuan kerja KPKNL Sorong pada tahun 2020 telah dialokasikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 non belanja pegawai sebesar **Rp2.130.207.000,00**. Dari keseluruhan anggaran yang dialokasikan tersebut, dapat terealisasi sebesar **Rp1.675.990.563,00** atau sebesar **78,67%** dengan rincian sesuai dengan tabel berikut :

Uraian Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Belanja	%
Belanja Barang	1.493.146.000	1.087.758.563	86,01%
Belanja Modal	637.061.000	588.232.000	92,34%
Jumlah	2.130.207.000	1.675.990.563	78,67%

2. Realisasi PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak)

Pendapatan Negara Bukan Pajak yang dapat diakomodir sebagai pendapatan pada DJKN dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

No.	Jenis Penerimaan	Mata Anggaran Penerimaan (MAP)
I	Penerimaan Fungsional, yang terdiri dari:	
	1. Pendapatan Bea Lelang;	423227
	2. Pendapatan Biad PPN (Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara).	423228
II	Penerimaan Umum, yang terdiri dari:	
	1. Pendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor;	423122
	2. Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/ Rusak/ Dihapuskan;	423129
	3. Pendapatan Sewa Rumah Dinas/ Rumah Negara;	423141
	4. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro Rekening Bendahara);	423221
	5. Pendapatan Jasa Lainnya;	423291
	6. Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita oleh Negara;	423922
	7. Pendapatan Anggaran Lainnya.	423999

PNBP pada KPKNL Sorong yang berasal dari Penerimaan Bea Lelang dan Biad Pengurusan piutang negara sebesar **Rp2.530.747.770,00**, dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Biad PPN sebesar **Rp10.004.309,-** (MAP 423228);
- Pendapatan Bea Lelang sebesar **Rp2.520.743.461,00** (MAP 423227).

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Sorong ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan KPKNL Sorong sebagai salah satu unit penyelenggara pemerintahan. Rencana pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Sorong ditetapkan berdasarkan peta strategis Kemenkeu-*Three* yang terdiri dari 12 sasaran strategis dan 21 indikator kinerja utama.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah disampaikan pada BAB II, rata-rata pencapaian kinerja KPKNL Sorong tahun 2020 sebesar **106,46%** yang berarti pencapaian kinerja di atas 100%. Dari 21 IKU yang ditetapkan, 19 (tiga belas) IKU berwarna hijau, dan 2 (satu) IKU berwarna merah. Keberhasilan yang dicapai oleh KPKNL Sorong adalah bukti bahwa semakin dihayati dan dilaksanakannya nilai-nilai Kementerian Keuangan oleh seluruh jajaran KPKNL Sorong dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Adanya masalah/kendala dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diuraikan pada BAB I, bukan menjadi alasan bagi kami untuk tidak berbuat yang terbaik bagi organisasi, dengan bekerja lebih giat lagi serta terus menerus mengamalkan nilai-nilai dari Kementerian Keuangan. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan prestasi/capaian kinerja yang sudah baik, bahkan terus berusaha untuk meningkatkannya.

LAMPIRAN

**NILAI KINERJA ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG
TAHUN 2020**

Kode	IKU	V/C	Target 2020	Realisasi 2020	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder / Customer Perspective (40%)							38,27%	
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal							60,43%	
1a-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	71,32%	14%	36%	71,319%	71,32%	merah
1b-CP	Tingkat Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2016)	P/M	3%	0,42%	14%	36%	14,033%	14,03%	merah
1c-N	Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/H	100%	105,63%	11%	28%	105,63%	105,63%	hijau
2	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien							106,63%	
2a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	E/M	4,30	4,59	21%	100%	106,63%	106,63%	hijau
3	Pengelolaan lelang yang optimal							120,00%	
3a-CP	Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)	P/M	100%	135,81%	14%	100%	135,81%	120,00%	hijau
	Internal Process Perspective (30%)							34,13%	
4	Manajemen pelayanan yang berkualitas							116,18%	
4a-CP	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang	P/H	86	99,92	11%	100%	116,18%	116,18%	hijau
5	Tata kelola kekayaan negara yang efektif							115,46%	
5a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	340,00%	19%	33%	340,00%	120,00%	hijau
5b-CP	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	P/M	100%	118,18%	14%	24%	118,18%	118,18%	hijau
5c-CP	Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi	P/M	100%	110,47%	14%	24%	110,47%	110,47%	hijau
5d-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	110,53%	11%	19%	110,53%	110,53%	hijau

6	Penilaian yang berkualitas							120,00%	
6a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	30%	0,14%	14%	100%	199,52%	120,00%	hijau
7	Tata kelola lelang yang efektif							115,56%	
7a-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	34%	54,00%	14%	50%	158,82%	120,00%	hijau
7b-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	90%	100,00%	14%	50%	111,11%	111,11%	hijau
8	Edukasi yang efektif							103,06%	
8a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	86	88,63	14%	100%	103,06%	103,06%	hijau
9	Pengawasan dan pengendalian yang efektif							112,39%	
9a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	P/M	80%	100,00%	14%	50%	125,00%	120,00%	hijau
9b-CP	Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN	P/M	100%	104,77%	14%	50%	104,77%	104,77%	hijau
	Learning & Growth Perspective (30%)							34,14%	
10	SDM yang kompeten							120,00%	
10a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	14%	100%	120,00%	120,00%	hijau
11	Organisasi yang fit for purpose							117,19%	
11a-N	Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM	P/M	75	95,07	14%	33%	126,76%	120,00%	hijau
11b-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC	P/M	70	79,00	14%	33%	112,86%	112,86%	hijau
11c-N	indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai	P/M	80	94,98	14%	33%	118,72%	118,72%	hijau
12	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							104,19%	
12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95%	98,98%	14%	100%	104,19%	104,19%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								106,55%	hijau